

KONTRIBUSI INSENTIF INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Yusri Hazmi^{1*}, Aryati², Ali Imran³, IC Rachman⁴, Mizan⁵

^{1,2,3,4,5} *Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

^{1*} *yusri.poltek@gmail.com*

Abstrak— Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pembangunan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait penciptaan lapangan kerja, inovasi produk dan jasa, dan sumber penerimaan Negara. Dalam perekonomian nasional, UKM berkontribusi dalam membiayai pembangunan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, upaya peningkatan Produk Domestik Bruto yang bersumber dari sektor ini diharapkan kembali tumbuh. Dalam jangka panjang diharapkan menjadi sumber potensial keuangan yang berkelanjutan. Untuk ini diperlukan peran pemerintah, yang dapat diwujudkan melalui kebijakan fiskal. Terutama kebijakan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah terkait dengan pemberian insentif investasi kepada pelaku UKM. Kebijakan fiskal ini juga ditujukan untuk mendorong kegiatan UKM kembali tumbuh dan berkembang ditengah dampak Covid 19.

Kata kunci— Pertumbuhan Ekonomi, Insentif pajak, Tax holiday, dan Kredit pajak.

Abstract— The existence of Small and Medium Enterprises (SMEs) in national economic development in recent years has received attention from the government, especially related to job creation, product and service innovation, and sources of state revenue. In the national economy, SMEs contribute to financing development. In the midst of unstable economic conditions, efforts to increase Gross Domestic Product originating from this sector are expected to grow again. In the long term, it is expected to be a potential source of sustainable finance. For this, the role of the government is needed, which can be realized through fiscal policy. Especially the policies that are expected to be able to encourage an increase in state revenues that come from taxes. One of the policies implemented is related to the provision of investment incentives to SMEs. This fiscal policy is also intended to encourage SME activities to grow and develop amidst the impact of Covid 19.

Keywords— Economic growth, tax incentives, tax holidays, and tax credits.

I. PENDAHULUAN

Kontribusi UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak diragukan lagi. UKM berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui setoran pajak. Permasalahan perpajakan bagi sebagian UKM telah menjadi masalah krusial, ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Covid 19 memberi tekanan kuat terhadap kinerjanya. Untuk ini diperlukan peran pemerintah, guna mendorong aktivitas UKM tetap tumbuh. Pemerinh dapat memberikan insentif invsetasi. Insentif invsetasi sebagai instrumen fiskal, yang berbasis biaya dan keuntungan [1]. Upaya merangsang pertumbuhan UKM melalui insentif invsetasi, namun untuk saat ini perlu peningkatan. Dengan keringan pajak, pelaku UKM mendapat pengurangan pajak. Pelaku UKM mendapatkan kredit pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Dalam sejumlah kajian menyebutkan UKM berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru. Demikian penting keberadaan UKM bagi perekonomian, sehingga diperlukan peran pemerintah [2].

Di sejumlah Negara berkembang ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan lingkungan pendukung yang diperlukan untuk pertumbuhan UKM, sehingga dapat memainkan peran dalam transformasi ekonomi. Peran tersebut termasuk mobilisasi tabungan domestik untuk investasi; peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal; kontribusi besar terhadap produk domestik bruto; penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan [2]. Sebuah pertanyaan apakah kebijak pajak dapat mengatur

perilaku investasi sehingga dapat pertumbuhan dan perkembangan UKM. Jika demikian, tentunya ini menjadi rangsangan bagi pengembangan UKM. Perpajakan yang kompleks telah dianggap sebagai ancaman utama bagi pertumbuhan UKM. Terutama di negara yang kurang maju [1]. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait dengan upaya yang dapat dilakukan guna meminimalisir dampak pajak terhadap pertumbuhan UKM di tanah air. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait peran insentif invsetasi terhadap pertumbuhan UKM di Indonesia. Penelitian ini akan memberi manfaat bagi pemerintah dan UKM. Hal erat kaitanya dengan sebagai bahan evaluasi terkait dengan kebijakan perpajakan.

Untuk menghasilkan penelitian yang memiliki daya saing, penelitian ini telah melalui proses studi kelayakan. Kelayakan penelitian diukur melalui pemanfaatan issue penelitian, yang merupakan issue nasional. Sehingga hasil penelitian ini akan benar-benar memberi manfaat kepada pihak pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan fiskal perpajakan. yang salah satunya adalah insentif invsetasi bagi UKM di tanah air.

I.1 Teori Manfaat Pajak

Teori ini berangkat dari asumsi, pada dasarnya ada pertukaran atau hubungan kontraktual antara pembayar pajak dan negara. Negara menyediakan barang dan jasa tertentu kepada masyarakat dan masyarakat berkontribusi dalam pembiayaan persediaan ini. Besaran biaya sebanding dengan manfaat yang diterima [5]. Dalam pengaturan ini, tidak ada masalah seperti distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Sebaliknya, manfaat

diterima digunakan sebagai dasar untuk mendistribusikan beban pajak. Pajak dipungut berdasarkan prinsip ini. maka keadilan dapat tercapai. Namun teori manfaat menjadi sasaran kritik. Terdapat bebrapa argument dinataranya; (i) jika pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah dasar, orang yang tidak menggunakan sekolah tentu tidak dibebankan pajak. Hal ini dikarenakan tidak mendapat manfaat. Perpajakan berdasarkan teori manfaat tidak akan menghasilkan banyak pendapatan bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak orang mampu membayar pajak, atau tidak membayar pajak, yang disenakan mereka tidak menerima manfaat dari pengeluaran pemerintah. Jika negara memelihara hubungan tertentu antara manfaat yang diberikan dan manfaat yang dilayani, maka infrastruktur tidak ditujukan pada pihak tertentu, akan tetapi untuk semua. Kelemahan teori manfaat lainnya adalah bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum. Kesulitan teori ini adalah tidak mungkin melakukan indentifikasi manfaat yang dinikmati oleh individu tertentu untu setiap tahun.

I.2 Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Untuk menilai efisiensi pajak dan menilai kebijakan fiskal, teori manfaat untuk membayar pada awalnya dikembangkan. Menurut [6], teori ini menyatakan bahwa seseorang harus dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan membayarnya. Ini hanyalah upaya untuk memaksimalkan penilaian nilai eksplisit tentang efek distributif pajak. Pendekatan ini menganggap kewajiban pajak dalam bentuk yang sebenarnya, yaitu pembayaran wajib kepada negara tanpa *quid pro quo*. Ini tidak mengasumsikan hubungan komersial atau semikomersial antara Negara dan warga negara. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa beban perpajakan harus ditanggung bersama oleh anggota masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini mengharuskan beban pajak dibagi menurut kemampuan relatif mereka untuk membayar. Ahli teori berpendapat bahwa jika tujuan pemerintah adalah untuk mendistribusikan pendapatan, itu harus menetapkan pajak sesuai dengan prinsip kemampuan membayar. [7] menentang teori kemampuan membayar, bahwa seorang warga negara harus membayar pajak hanya karena dia dapat dan bagian relatifnya dalam total beban pajak ditentukan oleh kapasitas membayar relatifnya. Doktrin ini telah populer setidaknya selama teori manfaat. Teori ini didukung oleh para pemikir sosialis karena kesesuaiannya dengan ide dan konsep keadilan dan pemerataan. Doktrin tersebut juga mendapat dukungan yang sama kuatnya dari para pemikir nonsosialis juga dan menjadi bagian dari teori ekonomi kesejahteraan. Namun, teori ini menjadi bahan kritik, yang disebabkan bahwa sulit untuk mengukur kemampuan. Secara umum, ada tiga ukuran kemampuan: pendapatan, pengeluaran dan properti yaitu; (i) pendapatan yang dikatakan sebagai ukuran kemampuan yang lebih baik daripada kekayaan; (ii) pengeluaran sebagai ukuran kemampuan yang terbaik.

I.3 Insentif Investasi

Insentif investasi pajak sebagai pengurangan dari penghasilan kena pajak, berdasarkan beberapa persentase dari investasi baru. Insentif paka digunakan untuk mendorong investasi di beberapa sektor ekonomi startegis.

Menurut [8] insentif invsetasi investasi diberikan kepada perusahaan yang menggunakan peralatan atau mesin untuk pabrik. Besaran insentif didasari besaran biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama aset tersebut digunakan. [9] insentif investasi meliputi insentif investasi untuk pabrik dan mesin pada sektor pertanian, insentif investasi untuk mesin produksi yang digunakan perusahaan manufaktur; dan insentif investasi untuk pabrik dan mesin yang diperoleh sebagai pengganti yang usang

I.4 Tax Holiday

Persoalan investasi di tanah air, khususnya realisasi yang mangkrak. Tax holiday adalah bentuk insentif invsetasi yang umum digunakan oleh negara berkembang dan negara dengan kondisi ekonomi dalam masa transisi. Tujuan tax holiday adalah untuk menarik investasi pada sektor tertentu. Selama pengampunan pajak, perusahaan yang memenuhi syarat tertentu akan memperoleh pembebasan dari pembayaran pajak. Ini dapat mencakup pembebasan pajak selama waktu tertentu [10]. Kebijakan tax holiday tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan negara tetapi juga bisa mengurangi pendapatan negara. Ini dikarenakan pendapatan negara dari sektor pajak seperti pajak penghasilan badan (PPh Badan). Pada sejumlah Negara pengampunan pajak diperoleh perusahaan selama tiga sampai dengan 5 tahun. Dalam studi yang dilakukan oleh [1], ditemukan Tax holiday memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan pertumbuhan UKM yang menunjukkan pertumbuhan UKM dijelaskan oleh tax holiday.

I.5 Kredit Pajak

Kredit pajak adalah jumlah pajak yang sudah dibayar atau sudah terhitung oleh Wajib Pajak pada awal periode pajak. Kredit pajak adalah akumulasi dan pajak yang diambil oleh pihak lain dan sudah dikurangi dengan pajak terutang. Manfaat kreditpajak sendiri dapat mengurangi pajak terutang yang dimiliki wajib pajak. Hal ini juga membantu wajib pajak mengetahui apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang dimilikinya [11]. Menurut [12] kredit pajak investasi diperoleh sebagai persentase tetap atas pengeluaran investasi yang terjadi dalam satu tahun atas modal yang memenuhi syarat tertentu. [13] kredit pajak investasi pada dasarnya adalah insentif terkait pajak yang memungkinkan individu atau entitas mendapatkan pengurangan pajak dalam jumlah persentase tertentu dari biaya yang dengan terkait investasi tertentu. [14] menyebutkan, kredit pajak investasi ditujukan untuk merangsang kondisi perekonomian suatu negara untuk tumbuh dengan cara mendorong pengeluaran terkait modal, atas pengeluaran tersebut wajib pajak memperoleh kredit pajak

II. METODOLOGI PENELITIAN

II.1 Jenis dan Suber Data

Penelitian ini menggunakan data skunder runtun waktu, mulai tahun 1985-2021. Data bersumber dari: Bank Indonesia, BPS RI, Kementrian Keuangan, Badan Fiskal Nasional dan sumber lain yang relevan. Untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang antara variable dilakukan dengan uji kointegrasi *Long Run Bounds Test*. Sedangkan model estimasi VECM digunakan untuk mengetahui ada hubungan jangka pendek. Data *time series*

memiliki kecenderungan tidak stasioner. Data tidak stasioner akan menghasilkan model regresi semu, yakni hasil pengolahan statistik menunjukkan R Square tinggi dan t-statistik signifikan. Akan tetapi hasilnya tidak memiliki arti secara keilmuan. Uji stasioner data dilakukan dengan uji *unit root* untuk masing-masing variabel.

II.2 Uji Akar Unit

Data yang tidak stasioner tidak memenuhi syarat, atau dengan kata lain data memiliki rata-rata dan variannya berubah-ubah sepanjang waktu, Pengujian *unit roots* yang dipakai dengan menggunakan ADF (*Augmented Dicky Fuller*). Konsep pengujian *ADF-test* adalah jika suatu data time series tidak stasioner pada ordo nol, I(0), maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui ordo berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke-n (*first difference*) atau I(1), atau *second difference* atau I(2), dan seterusnya. Uji ini memiliki persamaan:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_p X_{pt}$$

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} - X_{1,t-1} + \beta_2 X_{2t} - X_{2,t-2} + \dots + \beta_p X_{pt} - X_{p,t-1}$$

Penetapan lag optimum pada model untuk mengetahui kombinasi lag pada model VECM. Lag optimal dipilih berdasarkan nilai *basis Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Bayesian Criterion (SC)*, serta *Hanna Quinn Criterion (HQ)*, sehingga dapat menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam pengujian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Schwarz Bayesian Criterion (SC) merupakan kriteria pemilihan model yang konsisten ketika *Akaike Information Criterion (AIC)* tidak konsisten. Penentuan lag optimum dilakukan dengan memilih nilai kriteria yang paling kecil. Selanjutnya dilakukan uji kointegrasi antar variabel.

II.4 Uji Kointegrasi

Setelah dilakukan uji akar unit untuk semua variable dan telah stasioner, baik pada tingkat level maupun pada tangga diferensial orde satu dan dua. Tahap selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi, yakni untuk mengetahui adanya hubungan dalam jangka panjang di antara variabel penelitian. Sebelum uji kointegrasi, terlebih dahulu ditentukan panjang lag optimal, yang dapat dilakukan melalui AIC, SC, LR, FPE dan HQ. Kointegrasi ini terbentuk apabila kombinasi antara variabel-variabel yang tidak stasioner menghasilkan variabel yang stasioner. Uji kointegrasi memiliki persamaan:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_t$$

maka, varian dari persamaan tersebut menjadi:

$$\epsilon_t = y_t - \beta_0 - \beta_1 X_1$$

Dengan catatan bahwa ϵ_t merupakan kombinasi linear dari X_1 dan X_2 . Konsep kointegrasi yang diperkenalkan oleh *Engle* dan *Granger* mensyaratkan bahwa ϵ_t haruslah stasioner pada I (0) untuk dapat menghasilkan keseimbangan pada jangka panjang.

II.5 Model Estimasi VECM

Model estimasi VECM merupakan model ekonometrika. Penelitian ini mengadopsi uji kointegrasi Johansen dan model koreksi kesalahan vektor (VECM).

Pengujian ini dilakukan sebagai menjadi alasan bahwa sebagian besar deret waktu tidak stasioner. Sehingga hasil regresi akan menghasilkan regresi semu. Engle dan Granger mengusulkan konsep kointegrasi, yang berarti ada hubungan stabil jangka panjang antara variabel ekonomi. Sims dan Watson menjelaskan lebih lanjut dan menurunkan analisis model multivariat dengan variabel akar unit. Berdasarkan ini, model VECM menjadi model analisis yang tepat untuk digunakan. Model VECM digunakan untuk mengeksplorasi hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek dengan variabel kointegrasi. Jika variabel-variabel tersebut terkointegrasi dalam penelitian ini.

II.3 Formulasi Penelitian

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis VAR yang semua variabel diasumsikan sebagai variabel endogen. Analisis VAR meliputi pengujian Kausalitas Granger yang digunakan untuk mengetahui bahwa dari dua variabel yang berhubungan dengan variable, sehingga menyebabkan variabel lain menjadi berubah. Adapun model umum persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta PE_t = \alpha_1 + \alpha_{11}\Delta PE_{t-1} + \alpha_{12}\Delta Inv_{t-1} + \alpha_{13}\Delta TH_t + \alpha_{14}\Delta KP_t + \mu_{1t}$$

$$\Delta Inv_t = \alpha_1 + \alpha_{21}\Delta PE_{t-1} + \alpha_{22}\Delta Inv_{t-1} + \alpha_{23}\Delta TH_t + \alpha_{24}\Delta KP_t + \mu_{2t}$$

$$\Delta TH_t = \alpha_1 + \alpha_{31}\Delta PE_{t-1} + \alpha_{32}\Delta Inv_{t-1} + \alpha_{33}\Delta TH_t + \alpha_{34}\Delta KP_t + \mu_{3t}$$

$$\Delta KP_t = \alpha_1 + \alpha_{41}\Delta PE_{t-1} + \alpha_{42}\Delta Inv_{t-1} + \alpha_{43}\Delta TH_t + \alpha_{44}\Delta KP_t + \mu_{4t}$$

Dimana:

- ΔPE = Pertumbuhan dari PE sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi
- ΔInv = Pertumbuhan dari Inv sebagai bentuk tingkat insentif investasi
- ΔTH = Pertumbuhan dari TH sebagai bentuk tingkat Tax Holiday
- ΔKP = Pertumbuhan dari KP sebagai bentuk tingkat Kredit Pajak
- t-1 = nilai lag dari masing-masing variable

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Hasil Uji Akar Unit

Untuk melakukan pengujian akar unit pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller (ADF). Uji ini dimaksudkan untuk menentukan stasioner atau tidak variabel penelitian. Apabila t-statistik lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan alfa 5 persen, maka data variabel penelitian telah stasioner. Variabel yang tidak stasioner pada level, akan dilakukan pengujian pada tingkat differential selanjutnya, sehingga akan diperoleh tingkat stasioner. Tabel III.1 merupakan hasil pengujian akar unit.

Tabel III.1 Hasil Uji Akar Unit Variabel Penelitian

Var	Level	1st different	2st different
ΔPE	-0,0889	-0,0516	-0,0001
ΔInv	-0,6155	-0,0668	-0,0021
ΔTH	-0,3836	-0,2682	0,0000
ΔKP	-0,9697	-0,0228	0,0000

Sumber: Data diolah tahun 2022.

Dari Tabel III.1 menunjukkan hasil pengujian untuk variable penelitian, yang yang berada pada tingkat first difference. Variabel ΔPE dan ΔInv stasioner berada pada tingkat $\alpha=10\%$. Sedangkan untuk variabel ΔTH stasioner berada pada first difference pada tingkat $\alpha=5\%$. Kemudian variabel ΔKP stasioner pada tingkat *second difference pada tingkat $\alpha=5\%$.*

III.2 Penentuan Panjang Lag Optimal

Tahap penentuan lag optimal merupakan tahapan penting karena bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan variabel dependen dalam merespon perubahan variabel lain yang dipengaruhi.

Tabel III.2 Optimal Lag

Lag	FPE	AIC	SIC	HQ
0	1.03e-10	-1.164.733	-1.146.230	-1.158.702
1	1.82e-17	-2.720.575	-2.628.060	-2.690.418
2	4.64e-18	-2.862.928	-26.96401*	-2.808.644
3	5.71e-18	-2.857.262	-2.616.723	-2.778.852
4	3.98e-18*	-29.88871*	-2.600.306	-28.62208*

Sumber: Data diolah tahun 2022.

Dari Tabel III.2 menunjukan hasil penentuan lag optimal kriteria FPE, AIC dan HQ merekomendasikan lag sebesar 4. Sedangkan kriteria LR dan SC memilih lag sebesar 2. Sehingga disimpulkan bahwa pemilihan lag optimal dalam studi ini pada lag 4.

III.3 Estimasi Vector Error Correction Model

Untuk mengetahui estimasi VECM dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel (1,305 dan 1,688). jika t-statistik lebih besar dari t-tabel, artinya variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Estimasi VECM pada studi ini menggunakan model kointegrasi *quadratic with intercept and trend* dan lag interval tiga periode dimana (k-1).

Tabel III.3 Hasil Estimasi VECM

Variabel	Koefisien	T-Statistik
D(LDI(-1))	0,018041	-1,06817
D(LDI(-2))	0,038906	-1,23107
D(LDI(-3))	-0,021553	-1,46444*
D(LFDI(-1))	-0,000139	-0,06417
D(LFDI(-2))	0,00918	-1,90375**
D(LFDI(-3))	0,001224	-0,28356
D(BD(-1))	0,016024	-0,11011
D(BD(-1))	0,058192	-0,27982
D(BD(-1))	-0,204049	-1,55291*
Nilai Koefisien Penyesuaian		
D(LPDB)	-0,181661	-2,10330**
D(LDI)	6,318613	-1,96856**
D(LFDI)	-14,79427	-0,47829
D(BD)	-0,115274	-0,33415
R-squared	0,892286	
Adj. R-squared	0,803581	

F-statistic 10,059

Sumber: Data diolah tahun 2022.

Berdasarkan hasil estimasi Tabel III.3, F-statistik lebih besar dari F-tabel (10,059>2,90) bahwa seluruh variabel independen dalam studi ini secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. R-square menunjukkan 0,892286 yang artinya variabel independen Inv, TH dan KP secara bersama-sama menjelaskan PE sebesar 89,22 persen sedangkan sisanya dijelaskan variabel di luar studi.

Dalam estimasi model VECM jangka panjang menghasilkan bahwa insentif investasi dan kredit pajak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada lag ketiga. Perubahan satu persen pada variabel insentif investasi dan kredit pajak di periode ketiga sebelumnya, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan. Sementara tax holiday berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada lag kedua, yaitu perubahan satu persen pada variabel tax holiday pada lag kedua sebelumnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan.

Koefisien penyesuaian (*error correction term*) menunjukkan kecepatan penyesuaian untuk keseimbangan. Dimana dalam hasil estimasi VECM dapat dilihat variabel Investasi domestik signifikan secara statistik. Sehingga variabel insentif investasi terjadi koreksi pergerakan menuju keseimbangan dalam jangka panjang. Dapat dilihat pada Tabel ini dalam hasil estimasi VECM jangka panjang menunjukkan insentif investasi, tax holiday, dan kredit pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien secara berturut-turut sebesar -0,121532 persen, 0,014451 persen dan -1,954190 persen. Dengan demikian ini berarti ketika terjadi perubahan insentif pajak, tax holiday, dan kredit pajak pada lag pertama sebesar satu persen, maka akan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi dalam periode jangka panjang.

III.4 VECM dalam Jangka Panjang

Tabel III.4 VECM Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	T-statistik	Keterangan
Inv(-1)	-0,12153	[-12,3990]**	Signifikan
TH(-1)	0,014451	[5,83809]**	Signifikan
KP(-1)	-1,95419	[-12,6857]**	Signifikan

Sumber: Data diolah tahun 2022

III.5 Uji Kausalitas Granger

Untuk menguji kausalitas antar variabel yang mempunyai peluang untuk menjadi variable endogen maupun eksogen. Adapun uji kausalitas *bivariate* (dua arah) pada penelitian ini dengan menggunakan *Granger Causality Test* dengan tingkat alpha 5 persen dan 10 persen. Jika nilai F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel atau nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 5 persen,

dengan demikian maka hipotesis H_0 ditolak, atau terima H_1

Tabel III.5 Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	F-Statistic	Prob.
Inv does not Granger Cause PE	321.757	0.0391*
PE does not Granger Cause Inv	480.958	0.0085*
TH does not Granger Cause PE	270.928	0.0657**
PE does not Granger Cause TH	0.29032	0.8320
KP does not Granger Cause PE	376.210	0.0228*
PE does not Granger Cause KP	354.286	0.0283*

Sumber: Data diolah tahun 2022.

Tabel 3.6 menunjukkan investasi domestik terhadap PE memiliki f-statistik lebih besar dibanding f-tabel yang artinya hipotesis nol dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Sebaliknya PE terhadap investasi domestik memiliki probabilitas kurang dari derajat kepercayaan 5% sehingga hipotesis nol dapat ditolak. Hal ini berarti bahwa investasi domestik dan PE saling mempengaruhi satu sama lain atau memiliki pola hubungan kausalitas dua arah. Hasil uji Kausalitas Granger TH terhadap PE menunjukkan nilai f-statistik lebih besar dari f-tabel sehingga H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 1%. Sebaliknya variabel PE terhadap FDI menunjukkan nilai f-statistik lebih kecil dibandingkan f-tabel pada derajat kepercayaan 5% sehingga H_0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian hubungan kausalitas TH dan PE memiliki pola satu arah TH mendorong PE.

IV KESIMPULAN

Pasca covid 19, penerimaan negara yang bersumber dari pajak mengalami penurunan. Kondisi ekonomi yang belu puluh, mengakibatkan aktivitas ekonomi belum tumbuh. Upaya peningkatan penerimaan negara melalui aktivitas UKM dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari kegiatan UKM. Pengeluaran pemerintah hingga 80 persen bersumber dari pajak. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam terkait dengan kebijakan perpajakan (insentif invsetasi (tax holiday, kredit pajak dan insentif investasi).

Untuk ini diperlukan upaya yang diyakini mampu meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kebijakan insentif investasi merupakan salah satu insentif invsetasi yang dapat digunakan dalam praktek perpajakan di Indonesia. Insentif investasi tidak ditujukan untuk periode tertentu, akan tetapi bersifat tetap. Sehingga pelaku UKM mendapat kepastian dan keringan pajak. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Salah satu peran kebijakan pajak (fiskal) adalah menyediakan iklim invetasi yang sehat bagi pelaku usaha. Kebijakan ini bentuk dari kepedulian pemerintah kepada pelaku dunia usaha dalam meningkatkan daya saing. Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi investasi, namun ketidak ketidaktastian regulasi perpajakn justru memberi sigyal negatif kepada pelaku usaha dan investor.

Dalam kondisi ini pemerintah tidak melihat wajib pajak, sebagai subjek pajak, yakni sumber pendapatan

negara. Pemerintah mendukung kebijakan perpajakan melalui instrumen stimulus fiskal, sehinga mempengaruhi perekonomian. Stimulus /insentif fiskal seperti: insentif invsetasi, tax holiday dan kredit pajak. Kebijakan perpajakan melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi biaya kegiatan USH UKM. Untuk menjaga kegiata ekonomi tetap tumbuh pasca Covid 19, pemerintah perlu memberikan pajak kepada pelaku UKM, hal ini sebagai respon pemerintah dalam menyikapi sektor yang terdampak pandemi tidak semakin meluas. Pemerintah perlu melakukan penurunan PPh badan sebagai upaya mendukung keberlangsungan dunia usaha (UKM), serta mendorong iklim investasi.

REFERENCE

- [1] M. A. Kader. 2018. Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/675>.
- [2]]Putri D. N dan Ilmi A. F. 2018. Peran UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal JEP A*. Vol. 3, No. 2.
- [3] Ermilova, M. V. 2017. Tax planning at the enterprise. *Journal of Science and Education*, 6 (30), 31-33.
- [4] Dzobelova, V. B., Berkaeva, A. K. 2017. Planning tax revenues to the regional budget based on the existing tax potential. *Economics and Management: problems, solutions*, 11 (3), 77-85.
- [5] Artemenko, D. A., Aguzarova, L. A., Aguzarova, F. S., Porollo, E. V. 2017. Causes of Tax Risks and Ways to Reduce Them. *European Research Studies Journal*, 3B (20), 453-459.
- [6] Lukjanchikova, E. K., Morozova, A. S., Zyrjanova, V. D. 2017. Tax planning as a component of economic security. *Science Diary*, 5 (5), 30.
- [7] Sheina, A. Yu. 2018. BEPS: Prerequisites, state and prospects. *Taxes-Journal*, 2, 42-48.
- [8] Tirlea, M. R. 2018. Aspects on establishment and ending of tax receivable (part I). *Economie si Sociologie: Revista Teoretico-Stiintifica*, 1, 38-52.
- [9] Aguzarova, F. S., Khokhoeva, Z. V. 2014. The importance of taxes in the increase of investment activity in the North Caucasian Federal District. *Fundamental research*, 11 (4), 836-839.
- [10] Aguzarova, L. A., Elbakieva, Z.B. 2014. Tax regulation in the system of intergovernmental relations of the Russian Federation. *Economic and legal aspects of implementation of the strategy of Russia's modernization: real imperatives of dynamic socioconsulting development*, Pp. 6-10.
- [11] Bondarenko, M. 2017. Place of tax planning in tax law. *Theory and practice of law*, 1 (11), 8.
- [12] Myasnikova, Ye. S., Zatsepina, Yu.S., Goncharova, N.A. 2017. The scope of tax planning and forecasting at the macro level. *Economy and Society*, 3, 988-992.
- [13] Toyakovna, O. A., Ilyasovna, G. G., Azimovna, T. L., Tursinovna, A. S., Ramilevna, G. R. 2017. Tax reforms in Kazakhstan and Russia. *International Journal of Economic Perspectives*, 2 (11), 25-30.
- [14] Zagorodniy, A., Olikhovskiy, V. 2017. Concept of tax planning at the enterprise. *Economics, Entrepreneurship, Management*. 1 (7-4), 15-24.